

## RINGKASAN HASIL PENELITIAN DI BIDANG HUKUM

UPAYA-UPAYA APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK LINGKUNGAN (SUATU STUDI DI SURABAYA, GRESIK DAN MALANG) (M. Zaidun, Didik Endro P., Made Darma Weda, Toetik Rahayuningsih, 1993 : 72 halaman).

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982, aparat kepolisian sebagai aparat penyidik mempunyai tugas yang cukup berat. Sebagai delik yang relatif baru delik lingkungan sangat sulit dan rumit/kompleks dalam proses pembuktiannya. Untuk membuktikan telah terjadi delik lingkungan ada beberapa hal yang dipertanyakan : Bagaimana kemampuan aparat penyidik dalam membuktikan telah terjadi delik lingkungan ? Kendala/hambatan apa yang dihadapi, serta bagaimana upaya penanggulangannya ?

Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan aparat kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap delik lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan ditunjang dengan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu responden yang diteliti adalah dipilih / ditentukan berdasarkan kriteria aparat kepolisian yang bertugas / berhubungan langsung dengan masalah penyelidikan dan penyidikan delik lingkungan, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian dalam upaya menangani delik lingkungan sebagai delik yang relatif baru menghadapi kendala/hambatan baik bersi-

fat intern maupun ekstern. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencegah dan menanggulangi delik lingkungan dengan mengadakan suatu operasi, khusus yaitu Operasi Kemukus I dan II. Operasi Kemukus I merupakan suatu operasi yang bersifat preventif dan Operasi Kemukus II merupakan tindakan represif, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses hingga tingkat pengadilan.

Kendala/hambatan yang dihadapi aparat kepolisian sebagai aparat penyidik terhadap delik lingkungan adalah pada proses pembuktiannya, yaitu membuktikan telah terjadi atau ada dugaan terjadi delik lingkungan, disamping juga adanya konflik kepentingan sektoral yang mempengaruhi kelancaran operasi penyidik. Sementara itu dalam upaya peningkatan kualitas aparat mengalami kendala dalam bidang anggaran program dan juga frekuensi pemindahan / pengalihan tugas aparat kepolisian yang trampil ke bidang yang lain.

Untuk menanggulangi kendala/hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap delik lingkungan, di samping dilakukan operasi-operasi untuk menjaring pelaku, juga diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai instansi serta pelibatan pakar dalam bidang lingkungan dan hukum sebagai konsultan, agar dalam pembuktian telah terjadi delik lingkungan dapat diajukan sampai tingkat pengadilan dan dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.

*(L.P. Fakultas Hukum, Unair : 463/P4M/DPPM/L.331/BII/1992:*

*17 Juni 1992)*

## SUMMARY OF THE RESEARCH

POLICE'S EFFORTS IN INVESTIGATION AND INQUIRY THE ENVIRONMENTAL CRIMES (A Study in Surabaya, Gresik, and Malang) (M. Zaidun, Didik Endro P., Made Darma Weda, and Toetik Rahayuningsih, 1990 : 72 pages).

According to the act No. 4/1982, the police (as a the law enforcement agent of the investigation into the environmental crimes) has a specific task. It is a heavy duty of the police officer. As a "crime" its relatively new in Indonesia, proceeding of the evidence's finding of the environmental crime is extremely difficult and complex. In the process, there have been some inquired problems : how far could find the capacity of the investigation agent that the environmental crime is happened ? and what kind of constraints will be happened ? then, how far could it be handled by the police officer ?

The research aims for discribing and analizing of the capacity of the police officer as the investigation and inquiry agent into environmental crime.

By juridical approach, and also be supported by sociological; the menthod sampling of the research is purposive sampling. It means that respondents of the research chosed amongs the police agents who tackle problems related on environmental crime, both within the framework of policy and operational characters.

The result of the research shows that there have been many problems (constraints) in the process of the proved finding, both in the intern and exstern scope of

characters. For handling the problems effectively, it be arranged by a task force that called "Operasi Kemukus I dan II". "Operasi Kemukus I" has a preventive character. And has completely tool, "Operasi Kemukus II", be organized as repressive task. It means that in the "Operasi Kemukus II", the police officer has a role as an investigation and inquiry agent within handling of the environmental crime. Then they will send the result of their duty to the public prosecutor for the trial process.

The main constraint of their duty take places on the process of proved finding. It is related on the assumption and the values of the capacity of the evidences. Besides, there would be often face with a sectoral interest conflict amongs structural institutions, both in governmental and non governmental sectors. The other problems are in the field of budgeting and supporting of the skilled agents. There is no enough budgeting and skilled agents for handling the constraints.

It is very important for making coordination amongs the institutions that involved in the law enforcemen into environmental crime. The supporting of the expert, both in law and environmental matters, is also very urgent so that environmental cases will be brought by succeed on the trial.

(Res. Faculty of Law Airlangga University :  
463/P4M/DPPM/L.331/BII/1992 : Juni 17, 1992)